



---

# RESTORASI GAMBUT DALAM PUSARAN PILKADA

---



## **Ikhtisar**

Dalam rangka menyediakan informasi terkini berbasis data, Pantau Gambut melakukan kajian terkait keberlanjutan komitmen perlindungan dan restorasi gambut di tingkat daerah, khususnya di detik-detik pergantian kepala daerah melalui pemilihan kepala (Pilkada) di daerah prioritas restorasi lahan gambut. Dari riset ini terlihat bahwa isu gambut belum menjadi prioritas para kandidat kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini mengkhawatirkan, mengingat komitmen pemerintah daerah merupakan kunci untuk menyukseskan target restorasi gambut nasional. Pantau Gambut juga menemukan bahwa meskipun masyarakat yang tinggal di daerah-daerah prioritas restorasi berpendapat bahwa perlindungan gambut harus diperhatikan, mereka menganggap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan isu yang lebih penting. Dari temuan-temuan ini, Pantau Gambut melihat beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti untuk mendorong pengarusutamaan isu gambut di sektor-sektor strategis sehingga terjadi keberlanjutan jangka panjang dalam program perlindungan atas sumber daya alam ini. Tindak lanjut yang disarankan meliputi antara lain peningkatan sosialisasi pentingnya gambut, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi dengan prioritas daerah, dan penegakan hukum.



Foto: Danar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

## Latar belakang kajian

Perlindungan dan restorasi 2 juta hektar lahan gambut merupakan program nasional yang melibatkan berbagai pihak di berbagai tingkat pemerintahan. Untuk menjalankan program restorasi di 7 provinsi prioritas ini, peran pemerintah daerah tidak dapat dikesampingkan.

Peraturan Presiden (Perpres) No.1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) telah menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan program nasional ini. Secara spesifik, Pasal 22 Perpres ini menyebutkan bahwa 'Setiap unsur di lingkungan BRG dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRG maupun dalam hubungan

antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah'. Selain itu, di Pasal 14, Perpres ini juga menekankan peran penting pemerintah daerah, terutama gubernur, yang memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat sebagai koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah.

Selain Perpres, peraturan-peraturan lain juga menekankan peran penting pemerintah daerah dalam restorasi gambut, seperti misalnya peraturan yang diterbitkan kementerian dan BRG. Penugasan pemerintah daerah dalam kegiatan restorasi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 61 tahun 2017 tentang Penugasan sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 Kepada



Foto: Danar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

**Perlindungan dan restorasi 2 juta hektar lahan gambut merupakan program nasional yang melibatkan berbagai pihak di berbagai tingkat pemerintahan.**

Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Sementara itu, BRG, dalam rencana strategis restorasi gambut 2016-2020, menyatakan bahwa salah satu strategi yang diterapkan dalam menjalankan misi restorasi ini adalah 'peningkatan kepedulian, kemampuan, dan peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dunia usaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengelola lahan gambut berkelanjutan'.



Dengan mandat tersebut, komitmen dan keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah terkait keberadaan dan pengelolaan gambut menjadi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan dan kesuksesan program nasional restorasi gambut. Keberlanjutan komitmen dan kebijakan ini harus dapat dipertahankan meskipun ada perubahan kepemimpinan karena siklus demokrasi pemilihan setiap 5 tahun sekali. Dengan akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia Juni mendatang, 7 provinsi prioritas restorasi 2 juta hektar lahan gambut juga akan mengalami perubahan kepemimpinan di berbagai level, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota.

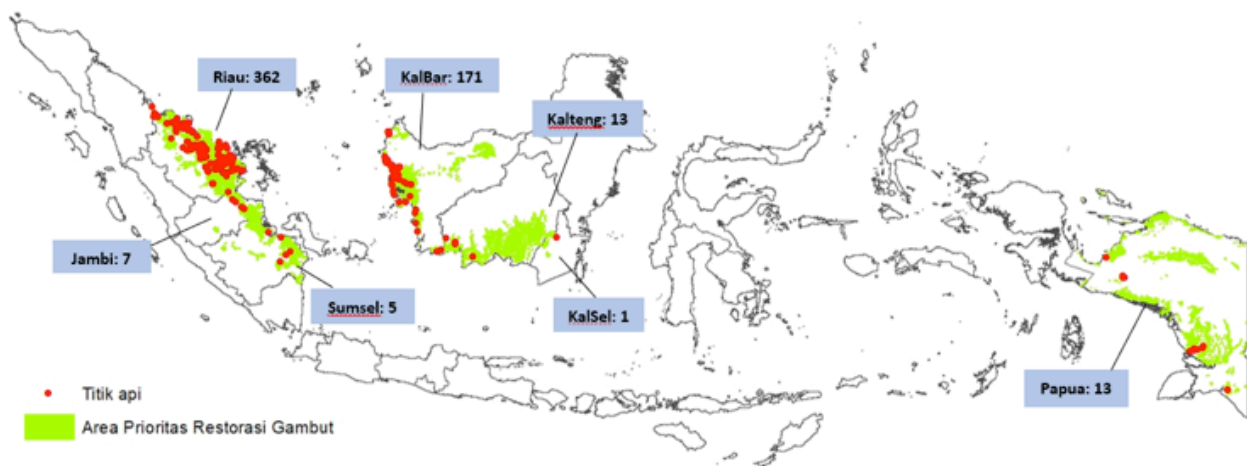
Pemerintah pusat merencanakan bahwa program nasional restorasi 2 juta hektar lahan gambut di bawah koordinasi BRG akan berlangsung dari 2016 hingga 2020. Namun, sebagai bagian dari proses alam, melindungi dan memulihkan gambut sendiri memerlukan waktu yang panjang melebihi rencana tersebut. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perlindungan dan pemulihan gambut pasca 2020. Untuk itu, pemerintah daerah sendiri juga perlu memiliki komitmen untuk menjaga

perkembangan dan kemajuan kegiatan-kegiatan restorasi yang sudah terlaksana. Tanpa koordinasi dan komitmen dari daerah, perkembangan yang saat ini ada akan terancam pelaksanaannya, seperti misalnya pelaksanaan dari Perda Gambut Sumatera Selatan.

Komitmen dan keterlibatan pemerintah daerah juga sangat penting mengingat masih tingginya kemungkinan terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Indonesia, baik karena faktor cuaca maupun karena perusakan oleh manusia. Tindakan-tindakan proaktif di tingkat daerah akan meningkatkan efektivitas upaya-upaya pencegahan dan antisipasi kebakaran yang berdampak masif secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Menurut laporan Bank Dunia, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia pada saat kebakaran 2015 mencapai US\$16 milyar, yang mencakup pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Dampak kesehatan juga sangat besar karena kualitas udara di desa-desa sekitar kebakaran yang buruk. Selain itu, kebakaran ini juga berdampak pada sektor pendidikan karena sekitar 5 juta siswa tidak dapat belajar akibat penutupan sekolah.

### Sebaran Titik Panas di Area Prioritas Restorasi Gambut per tanggal 1 Februari - 15 Mei 2018

(tingkat kepercayaan titik panas > 50%)



Sumber: MODIS NOAA, disiapkan oleh tim Pantau Gambut

Berdasarkan data yang didapatkan Pantau Gambut dari sensor MODIS NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) untuk periode Februari hingga pertengahan Mei 2018, yang bertepatan dengan periode kampanye Pilkada, terdapat ratusan titik panas berpotensi kebakaran di lokasi-lokasi prioritas restorasi gambut seperti terlihat dalam gambar di bawah. Sebaran aktual titik panas ini akan terlihat lebih banyak jika mengikutsertakan lokasi-lokasi di non-gambut. Dengan urgensi terkait implementasi peraturan yang ada, keberlanjutan perlindungan dan restorasi gambut, serta potensi terjadinya kebakaran, Pantau Gambut menelaah komitmen-komitmen para pasangan calon kepala daerah terhadap upaya perlindungan lahan gambut dan dukungan terhadap program nasional restorasi 2 juta hektar lahan gambut. Riset ini bertujuan mengetahui arah kebijakan masing-masing daerah di bawah pemerintahan mendatang dan keterpaduan dengan kebijakan nasional terkait restorasi gambut, serta memberikan wawasan kepada masyarakat luas akan pentingnya meneruskan upaya restorasi gambut ke pemerintahan selanjutnya.

## Metodologi

Riset ini menggunakan metodologi kualitatif melalui kajian menyeluruh atas program, visi, dan misi para pasangan calon kepala daerah dan kuantitatif melalui survei opini publik terhadap isu-isu prioritas di daerah-daerah yang menjadi prioritas restorasi gambut.

### *Kajian program, visi, dan misi*

Selain sebagai janji-janji kampanye, rancangan program, visi, dan misi para kandidat kepala daerah merupakan gambaran tentang bagaimana mereka melihat potensi yang harus dikelola dan tantangan yang harus dihadapi di setiap daerah. Oleh karena itu, memahami pandangan para calon ini dan rencana aksi mereka dapat memberikan wawasan kepada publik tentang kemungkinan-kemungkinan perkembangan yang akan terjadi di daerah dalam lima tahun mendatang.

Dalam melakukan penelitian ini, Pantau Gambut telah melakukan penyaringan terhadap pasangan-pasangan calon pemimpin daerah yang akan dicermati. Variabel yang digunakan adalah:

- 7 provinsi prioritas pemerintah pusat dalam restorasi 2 juta hektar  
Hanya pemilihan kepala daerah yang terjadi

di 7 provinsi ini yang menjadi fokus penelitian, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua.

- Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)  
Fokus penelitian adalah hanya pada kabupaten atau kota di dalam 7 provinsi tersebut yang wilayahnya tercakup dalam KHG.  
Kedua penyaringan tersebut menghasilkan 75 pasangan calon yang termasuk dalam penelitian ini. Pasangan-pasangan calon tersebut terdiri dari:
  - 13 pasangan yang akan mengikuti pemilihan gubernur-wakil gubernur di 4 provinsi
  - 7 pasangan pemilihan walikota-wakil walikota di 2 kota
  - 55 pasangan pemilihan bupati-wakil bupati di 18 kabupaten.

Sumber utama data untuk kajian ini berasal dari naskah program, visi, dan misi yang merupakan dokumen resmi para calon yang disampaikan kepada KPU dan ditampilkan kepada publik melalui [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id). Dari 75 pasangan ini, ada dokumen-dokumen dari 2 pasangan calon yang belum bisa diunduh dari web tersebut, yakni dari Kabupaten Muara Enim. Sehingga, kajian atas program-program mereka dilakukan melalui sumber kedua, yaitu pemberitaan di media dan publikasi materi-materi kampanye para pasangan calon yang ditampilkan dalam akun-akun media sosial mereka. Selain itu, pelaksanaan debat oleh KPU dan juga menjadi bahan kajian dan sumber tambahan.

*Caveat:* Dengan mempertimbangkan sensitivitas isu dan upaya menjaga independensi, Pantau Gambut tidak melakukan verifikasi kepada para pasangan calon terkait sebab dan alasan mereka mengajukan program, visi, dan misi yang akan mereka lakukan setelah nanti terpilih sebagai kepala daerah. Kajian ini tidak memberikan saran bagi pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu.

### *Survei opini publik atas isu prioritas daerah*

Dalam rangka mengetahui juga opini masyarakat, Pantau Gambut melakukan survei di tingkat pemilik suara yang berasal dari 7 provinsi prioritas restorasi. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas situasi di masing-masing daerah dari sudut pandang masyarakat umum.

Survei dilaksanakan pada 29-30 April 2018 bertepatan dengan penyelenggaraan Jambore Masyarakat Gambut di Desa Kiram, Banjarbaru,

<sup>1</sup>Jumlah ini sesuai dengan pemberitaan Antara dengan judul BRG Gelar Jambore Masyarakat Gambut di Banjar. Tautan berita: <https://www.antaraneews.com/berita/705568/brg-gelar-jambore-masyarakat-gambut-di-banjar>

Kalimantan Selatan. Jambore tersebut diikuti oleh 2.000 orang<sup>1</sup>. Pantau Gambut melakukan survei dengan jumlah sampel adalah 100 orang yang dipilih secara acak namun telah dipastikan berasal dari 7 provinsi prioritas restorasi gambut. Responden dalam survei ini memiliki usia antara 18-55 tahun, sehingga mereka secara hukum telah memiliki hak memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah 2018 di daerah masing-masing.

Dari hasil tabulasi data, jumlah 100 partisipan dalam survei ini terdiri dari 13 orang dari Sumatera Selatan, 13 orang dari Riau, 7 orang Jambi, 41 Kalimantan Tengah, 8 Kalimantan Barat, 17 Kalimantan Selatan, dan 1 Papua. Komposisi responden adalah 69 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.

### **Temuan 1:**

#### **Isu gambut kurang dipandang dalam Pilkada**

Berdasarkan hasil kajian terhadap 75 pasangan calon peserta Pilkada, terlihat bahwa:

- Hanya 2 pasangan calon memiliki program, visi, dan misi yang spesifik untuk gambut. Mereka adalah pasangan calon gubernur dan wakil untuk Sumatera Selatan Ishak Mekki-Yudha Pratomo dan pasangan calon bupati dan wakil untuk Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Edy Pratowo-Pudjirustaty Narang.

Pasangan Ishak Mekki-Yudha Pratomo memasukkan penanggulangan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dan pengelolaan lahan gambut sebagai program prioritas di sektor sosial dan lingkungan. Sementara itu, pasangan Edy Pratowo-Pudjirustaty Narang menyatakan bahwa salah satu misi pemerintahan mereka nanti adalah memperbaiki sumber daya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis bekerja sama dengan BRG dan organisasi non-pemerintah.

Kedua pasangan calon dengan program spesifik gambut ini adalah petahana di daerah masing-masing. Kandidat gubernur Ishak Mekki saat ini menjabat sebagai wakil gubernur Sumatera Selatan sementara pasangan Edy Pratowo-Pudjirustaty Narang saat ini adalah pasangan petahana bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulang Pisau. Dengan latar belakang tersebut, para pasangan calon ini telah memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap hal-

hal penting yang terjadi di daerah mereka dibandingkan dengan pasangan calon yang belum berpengalaman.

- Hanya 8 pasangan calon yang secara spesifik menyebut tentang kebakaran hutan/lahan dalam program atau visi/misi. Mereka adalah pasangan calon kepala daerah dari:
  1. Provinsi Sumatera Selatan: Ishak Mekki - Yudha Pratomo  
Pasangan ini juga memiliki program spesifik terkait gambut.
  2. Kabupaten Ogan Komering Ilir: Iskandar - Dja'far Shodiq
  3. Provinsi Riau: Syamsuar - Edy Nasution
  4. Provinsi Riau: Muhamad Lukman Edy - Hardianto
  5. Provinsi Kalimantan Barat: Sutarmidhi - Ria Norsan
  6. Kabupaten Kayong Utara: Citra Duani - Effendi Ahmad
  7. Kabupaten Katingan: Surya - Winda Natalia
  8. Kabupaten Katingan: Sakariyas - Sunardi

Para pasangan calon ini menempatkan isu karhutla secara beragam, yakni sebagai penjelasan misi atau sebagai program prioritas. Cara penjabaran program terkait karhutla yang dipilih para calon dapat dikategorikan dalam rencana langkah preventif dan reaktif. Rencana langkah preventif yang diajukan adalah seperti pencegahan kebakaran hutan dan pembukaan lahan tanpa membakar. Sementara itu, rencana langkah reaktif yang mereka ajukan meliputi penanggulangan dan pengendalian karhutla serta penurunan jumlah titik panas. Akan tetapi, para calon tidak memberikan penjelasan rinci tentang karhutla ini dalam dokumen program, visi, dan misi mereka.

- 61 pasangan calon memiliki program terkait lingkungan. Program-program terkait lingkungan dari para pasangan calon ini meliputi antara lain:
  1. Pembangunan daerah dan perencanaan tata wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam
  2. Pemanfaatan potensi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan
  3. Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan dan sektor minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat, seperti perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, dan mendorong cara hidup bersih
  5. Tindak lanjut terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh industri
  6. Perlindungan atas kawasan lindung dan konservasi serta kelestarian flora dan fauna
- 14 pasangan calon lainnya sama sekali tidak memiliki program terkait lingkungan.
  - Dari naskah program, visi, dan misi terlihat bahwa prioritas sebagian besar para calon peserta Pilkada ini adalah pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan pendidikan.

**Temuan 2:**

**Latar belakang tidak memengaruhi prioritas**

Latar belakang dan pengalaman sebagai kepala daerah bukan hal yang menentukan ada tidaknya program terkait restorasi gambut di dalam rencana para calon peserta pemilihan kepala daerah. Meskipun ada dua pasangan calon petahana yang menyebutkan program spesifik terkait gambut, ada 30 pasangan calon-calon lain yang juga memiliki pengalaman, baik secara individu maupun pasangan, sebagai petahana ataupun pemegang jabatan lainnya dalam pemerintahan. Padahal dengan pengalaman di pemerintahan dan pemahaman atas program nasional, mereka seharusnya dapat menerjemahkan kepentingan nasional ini ke dalam kebijakan di level daerah.

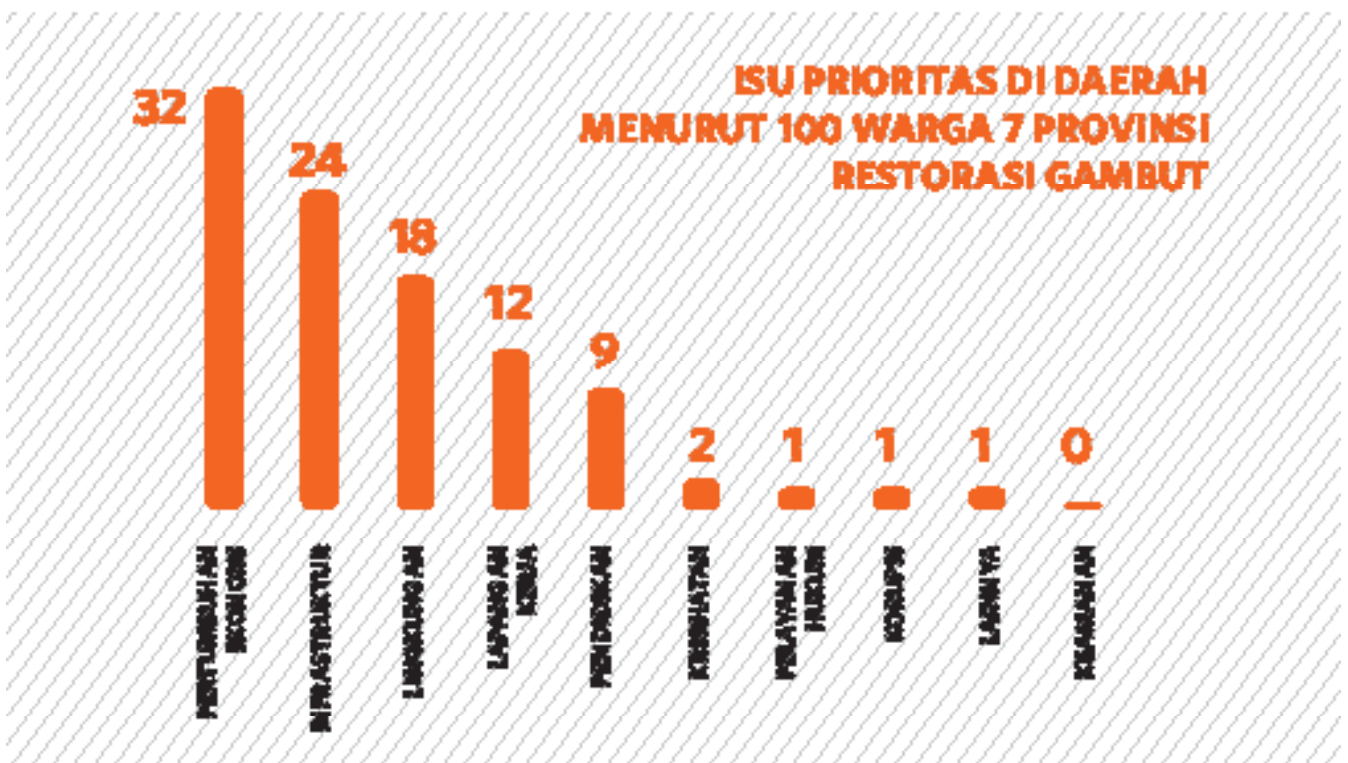
**Temuan 3:**

**Masyarakat umum menganggap gambut penting, tapi isu ekonomi lebih penting untuk diperhatikan**

Dari hasil tabulasi, dari total 100 responden:

- 87 menyatakan bahwa ada pemilihan kepala daerah di level provinsi, kabupaten, atau kota mereka. Sementara itu 13 lainnya menyebutkan bahwa tidak ada Pilkada pada 2018 ini di daerah mereka, di provinsi, kabupaten, atau kota. Hal ini terjadi karena memang tidak semua daerah di 7 provinsi akan menyelenggarakan pemilihan pada tahun ini. Beberapa di antara daerah ini telah melakukan pemilihan kepala daerah tahun lalu atau baru akan mengadakan pemilihan pada tahun mendatang.
- 95 menjawab bahwa mereka sudah pernah memberikan suara dalam Pilkada.
- 94 menyatakan akan memberikan suara jika Pilkada dilaksanakan.
- 73 menyatakan mengetahui program-program para calon kepala daerah.

Salah satu pertanyaan kunci dalam survei ini adalah isu-isu yang menurut responden merupakan prioritas dan utama di daerah mereka. Responden diberi 10 pilihan atas isu dan diminta memilih isu yang dianggap paling utama. Jawaban terbanyak adalah bahwa pertumbuhan ekonomi adalah isu yang seharusnya menjadi perhatian dan prioritas utama di daerah masing-masing. Prioritas berikutnya, menurut masyarakat, adalah pembangunan infrastruktur. Perlunya pengutamaan isu lingkungan menjadi prioritas ketiga bagi para responden ini (lihat tabel).





Dari 100 responden, 98 diantaranya menjawab bahwa penting bagi para pasangan calon kepala daerah atau pemerintah daerah memiliki komitmen perlindungan gambut. Alasan pentingnya komitmen kepala daerah atau pemerintah daerah dari para responden ini dapat dikelompokkan menjadi 4 klaster, sebagai berikut<sup>2</sup> :

Klaster 1: Perlindungan ekosistem dan kehidupan	Klaster 2: Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Klaster 3: Mencegah Kebakaran	Klaster 4: Sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah
<p>Contoh alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena untuk memelihara ekosistem bumi supaya terlindungi</li> <li>2. Karena gambut merupakan ekosistem esensial dimana gambut itu harus tetap basah</li> <li>3. Demi kelangsungan hidup manusia lebih lama</li> <li>4. Karena gambut adalah bagian ekosistem yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak</li> </ol>	<p>Contoh alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena lahan gambut tersebut bisa menambah lapangan pekerjaan yang lebih luas</li> <li>2. Sumber mata pencaharian masyarakat</li> <li>3. Karena lahan gambut di tempat kami selain sudah rusak dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi</li> <li>4. Demi kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur</li> </ol>	<p>Contoh alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena masalah gambut sangat kompleks bagi masyarakat yang hidup di kawasan gambut, bila masih kemarau mudah terbakar dan musim hujan mudah banjir sehingga butuh penanganan yang serius dari semua stakeholder terkait</li> <li>2. Karena kami ingin hutan dan gambut dijaga supaya tidak ada kebakaran</li> <li>3. Karena kami ingin punya seorang pemimpin yang berkomitmen agar tidak ada lagi kebakaran hutan gambut</li> <li>4. Agar mengurangi kebakaran dapat menjaga hutan tetap tetap basah dan daerah pertanian yang bebatasan langsung dengan hutan gambut tidak kebanjiran</li> </ol>	<p>Contoh alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena mendukung program pemerintah/BRG</li> <li>2. Karena tanpa ada komitmen dari pimpinan daerah maka sulit dalam hal penganggaran</li> <li>3. Agar program pemerintah sejalan dengan program daerah untuk perlindungan gambut</li> <li>4. Agar masyarakat tidak bingung akan daerah dan komitmen daerah</li> </ol>



Foto: Dinar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

<sup>2</sup>Contoh alasan-alasan dalam tabel diangkat jawaban asli para responden dan tanpa penyuntingan.



## Analisis dan Rekomendasi

Pantau Gambut, melalui Simpul Jaringan di daerah yang tersebar di 7 provinsi prioritas restorasi, mengamati bahwa ada beberapa kemungkinan mengapa program nasional restorasi gambut ini tidak menjadi isu prioritas dan kurang diperhatikan di tingkat daerah, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Analisa atas isu-isu tersebut dan rekomendasi tindak lanjut, dipaparkan dalam tabel berikut:

No	Tindak lanjut untuk pengarusutamaan gambut	Deskripsi	Rekomendasi berdasarkan aktor		
			Pemerintah pusat	Pemerintah daerah	Masyarakat
1	Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya melindungi gambut dengan menggunakan pendekatan prioritas daerah, seperti pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, sehingga tidak bergantung pada momentum kebakaran hutan dan lahan.	Dari hasil survei opini publik, masyarakat umum memandang bahwa isu pertumbuhan ekonomi adalah hal paling penting bagi mereka, disusul dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, sosialisasi pentingnya menjaga gambut dari sudut pandang dampak ekonomi dan mendukung pembangunan infrastruktur perlu dipertegas.	<p>Pemerintah pusat bersama dengan seluruh instansinya meningkatkan sosialisasi pentingnya lahan gambut bagi masyarakat, baik terkait dampak perubahan lingkungan bagi individu maupun secara ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan kolaborasi antara BRG dengan kementerian lain dan/atau dinas-dinas setempat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KLHK dan BRG melakukan sinergi kegiatan-kegiatan terkait restorasi gambut dengan menitikberatkan pada prioritas yang ada di masing-masing daerah, seperti pembangunan ekonomi dan infrastruktur</li> <li>Perlu penegasan komitmen langsung dari presiden untuk mendorong sinergi tujuan besar restorasi gambut ke dalam program-program kementerian. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menegaskan keterkaitan restorasi gambut dengan strategi nasional Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, seperti pencapaian target nilai kontribusi nasional (Nationally Determined Goals/NDGs) dalam penurunan emisi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah daerah mendorong peran aktif semua lembaga pemerintahan di daerah, baik yang terkait restorasi gambut maupun yang tidak, untuk turut memahami gambut dan kemudian meng-urusutamakan isu perlindungan gambut dengan membuat peraturan daerah untuk perlindungan dan pemulihan gambut yang dikonsultasikan dengan KLHK, BRG, dan instansi terkait lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait penyebaran informasi tentang gambut dan pelatihan-pelatihan dalam rangka pemanfaatan gambut secara berkelanjutan.</li> </ul>

No	Tindak lanjut untuk pengarusutamaan gambut	Deskripsi	Rekomendasi berdasarkan aktor		
			Pemerintah pusat	Pemerintah daerah	Masyarakat
		<p>Dalam Pilkada 2018 ini terlihat adanya kecenderungan untuk menyamakan isu yang diangkat ke publik. Hal ini terlihat dalam pemilihan isu-isu yang menjadi tema di beberapa acara debat antara kepala daerah yang dilakukan KPU sehingga mengurangi porsi pembahasan isu yang spesifik daerah. Berikut contoh tema debat yang telah dilakukan:</p> <p>a. Provinsi Sumatera Selatan (debat pertama) Tema: Reformasi birokrasi dan persoalan ekonomi, hukum, politik, dan infrastruktur untuk Sumatera Selatan yang sejahtera.</p> <p>b. Kabupaten Ogan Komering Ilir Tema: Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPUD agar merancang debat pasangan calon dengan salah satu fokus mempertanyakan komitmen mereka dalam mendukung program nasional perlindungan dan restorasi gambut.</li> <li>• Kepala daerah menjalankan program-program prioritas daerah masing-masing dengan mengintegrasikan perlindungan gambut dan mendukung restorasi yang telah menjadi program nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat dan kelompok masyarakat aktif menyuarakan kepentingan warga yang tinggal di daerah gambut. Daerah gambut kemungkinan besar tidak dianggap sebagai kantong suara bagi para pasangan calon, sehingga jarang diperhatikan dan luput dari program-program prioritas pemerintahan baru nantinya. Padahal, memastikan perlindungan gambut berarti juga mencegah dampak buruk kerusakan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah non-gambut.</li> </ul>
2	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pembuatan RTT, RPPEG, dan RREG melalui proses koordinasi lintas kementerian dan daerah.</li> <li>• KLHK perlu memastikan bahwa kebijakan dan peraturan-peraturan terkait peran penting pemerintah daerah dilaksanakan dengan baik, terutama seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 61 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah mempertimbangkan RTT, RPPEG, dan RREG dalam merancang kebijakan, membuat rencana anggaran dan menjalankan program-program di daerah.</li> <li>• Pemerintah daerah memahami dan membuat program yang sejalan dengan prioritas nasional. Birokrasi adalah salah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, turut aktif memonitor kebijakan dan implementasinya oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan dan restorasi gambut.</li> </ul>



No	Tindak lanjut untuk pengarusutamaan gambut	Deskripsi	Rekomendasi berdasarkan aktor		
			Pemerintah pusat	Pemerintah daerah	Masyarakat
			<p>2017 tentang Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan tugas-tugas kepala pemerintahan provinsi untuk kegiatan restorasi gambut. KLHK perlu memastikan hal ini secara transparan kepada publik melalui teknologi informasi yang diperbaharui secara berkala.</p>	<p>satu kunci keberlanjutan suatu program dan kebijakan. Pejabat-pejabat struktural dan karier akan menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan meskipun terjadi dinamika politik dengan adanya pergantian gubernur, bupati, atau walikota.</p>	
3	<p>Pengintegrasian upaya restorasi dan perlindungan gambut dalam program pemerintah daerah yang terpilih dalam Pilkada 2018 dan pemilihan umum di legislatif dan eksekutif yang akan datang.</p>	<p>Perlindungan atas gambut memerlukan komitmen jangka panjang yang seharusnya tidak rentan terhadap siklus pemilihan setiap lima tahun sekali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala-kepala daerah terpilih di berbagai tingkat pemerintahan di 7 provinsi prioritas restorasi, baik yang sudah ataupun tidak memiliki program terkait gambut, menjadikan upaya perlindungan dan restorasi gambut sebagai bagian dari program-program mereka</li> <li>• Mengadopsi program perlindungan dan restorasi gambut yang meningkatkan perekonomian warga. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dengan BRG, KLHK, Lembaga Swadaya Masyarakat atau institusi riset, dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi riset atau implementasi yang sudah dijalankan.</li> <li>• Pemerintah daerah lebih proaktif dalam upaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat aktif mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi program perlindungan dan restorasi gambut demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.</li> </ul>	

No	Tindak lanjut untuk pengarusutamaan gambut	Deskripsi	Rekomendasi berdasarkan aktor		
			Pemerintah pusat	Pemerintah daerah	Masyarakat
4	Tindak lanjut dalam pengusutan penyebab kebakaran 2015.	Simpul Jaringan Pantau Gambut melihat bahwa lemahnya penegakan hukum terkait peristiwa kebakaran tahun 2015, terutama pada kasus yang melibatkan perusahaan, berkontribusi terhadap antipati masyarakat terhadap isu gambut. Pantau Gambut meminta pihak berwenang untuk melanjutkan proses hukum bagi para pelaku pelanggaran kebakaran hutan dan lahan pada 2015, terutama korporasi. Mengambil contoh perkembangan di Jambi, Kapolda pernah mengungkapkan bahwa ada 23 kasus pelanggaran kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang telah ditindak, melibatkan 14 pelaku yang terdiri dari 10 perorangan dan 4 korporasi. Selain itu ada tindak lanjut 26 kasus pelanggaran tersebut pada 2016, hanya 12 kasus perorangan yang diproses.	Pemerintah bekerjasama dengan kepolisian mengusut pelanggaran kebakaran hutan dan lahan dengan juga memanfaatkan kemampuan teknologi monitoring dan analisa citra satelit yang dilakukan oleh beberapa pihak non-pemerintah, serta memanfaatkan citizen journalism sebagai alternatif sumber bukti untuk pengusutan.	<p>perlindungan gambut dan penanggulangan isu kebakaran hutan dan lahan melalui penerbitan kebijakan perlindungan dan pemulihan gambut serta aktif dalam mensosialisasi-kannya ke jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian setempat menindaklanjuti laporan atas pelanggaran kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah masing-masing.</li> </ul>	Masyarakat





Untuk membaca kajian ini secara lengkap, silakan mengunduhnya di [pantaugambut.id/publikasi/restorasi-gambut-dalam-pusaran-pilkada](https://pantaugambut.id/publikasi/restorasi-gambut-dalam-pusaran-pilkada)



## **pantau gambut**

Komplek Pertanian, Jl. Sirsak No.8, RT.11/  
RW.10, Ps. Minggu  
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
P : (021)22001987

Pantau Gambut merupakan sebuah inisiatif independen dari berbagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan teknologi, kolaborasi data, dan jaringan masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam memastikan keberhasilan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.